



Geostrategi Indonesia dalam Dinamika Politik Global dan Regional

Mayjen TNI Hari Mulyono, S.E., M.M.

Tenaga Ahli Pengajar Bidang Geostrategi dan Tannas Lemhannas RI

Abstrak

Dinamika perkembangan politik global dan regional akhir-akhir ini masih diwarnai perebutan pengaruh dan kepentingan antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Amerika Serikat (AS) di beberapa kawasan, terutama di Asia. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya antisipasi dari pemerintah guna mengamankan geostrategi Indonesia dalam dinamika politik global dan regional yang dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka melindungi kepentingan nasional Indonesia, agar proses perjuangan mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional Indonesia dapat berlangsung aman dan lancar.



PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan politik global dan regional merupakan keniscayaan, dan dampaknya secara langsung maupun tidak langsung dapat membawa tekanan yang bisa merugikan dan membahayakan kepentingan nasional. Oleh karena itu diperlukan strategi pembangunan dengan mencermati, memperhatikan, dan mempertimbangkan kondisi geostrategi Indonesia dihadapkan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis terkini.

Dinamika perkembangan politik global dan regional akhir-akhir ini masih diwarnai perebutan pengaruh dan kepentingan antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Amerika Serikat (AS) di beberapa kawasan, terutama di Asia. Sementara di kawasan regional Asia Tenggara, juga sedang berproses menyatunya negara-negara ASEAN melalui kesepakatan ASEAN Community (Komunitas ASEAN). Dari kedua dinamika perkembangan politik tersebut, perlu mewaspadai pengaruh tekanannya terhadap geostrategi Indonesia, karena hal tersebut apabila tidak diantisipasi kemungkinan buruknya akan dapat merugikan dan membahayakan kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional Indonesia.

Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya antisipasi dari pemerintah guna mengamankan geostrategi Indonesia dalam dinamika politik global dan regional yang dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka melindungi kepentingan nasional Indonesia, agar proses perjuangan mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional Indonesia dapat berlangsung aman dan lancar.

PEMBAHASAN

Geostrategi Indonesia

Pada dasarnya Geostrategi merupakan rumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama. Dalam merumuskan geostrategi perlu memperhatikan berbagai faktor internal dan eksternal yang akan mempengaruhinya, yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, di samping faktor lainnya seperti keadaan global dan regional.¹

Bagi bangsa Indonesia, geostrategi dipandang sebagai suatu strategi atau cara terbaik yang ditempuh dalam mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 melalui pembangunan nasional. Hal tersebut dimaksudkan untuk menuju cita-cita masa depan yang lebih baik, lebih aman, lebih damai, dan sejahtera melalui pengendalian ruang, situasi, dan waktu². Dengan kata lain, Geostrategi Indonesia merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa bentuk, luas dan lokasi negara dengan memanfaatkan segenap konstelasi geografi Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia dalam menentukan kebijakan, arahan serta sarana-sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan sosial.

Selain itu geostrategi Indonesia dapat juga digunakan sebagai pedoman ketahanan nasional dalam menganalisa aspek Astagatra yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi bangsa. Dengan diketahuinya tingkat ketahanan nasional, akan diketahui pula sampai sejauh mana pencapaian tujuan nasional dapat dicapai. Selanjutnya, dapat dibedakan anasir disintegrasi bangsa, baik anasir luar, yaitu pemaksaan kehendak golongan tertentu



melalui berbagai aspek kehidupan, maupun anasir dalam, yaitu adanya upaya melupakan sejarah bangsa dengan mengabaikan kesepakatan-kesepakatan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada hakikatnya, konsep geostrategi Indonesia bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar kedaulatan nasional, ataupun untuk melakukan ekspansi terhadap negara lain. Konsep geostrategi Indonesia didasarkan pada kondisi, metode atau cara dalam mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan yang timbul serta untuk menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dalam pembangunan nasional.

Implementasi geostrategi Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat dalam substansi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sangat jelas tersirat cita-cita berkebangsaan (cita-cita nasional), tujuan berkebangsaan (tujuan nasional), kepentingan berkebangsaan (kepentingan nasional) dan tugas pokok berkebangsaan (tugas pokok nasional/ fundamental national mission) dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, sebagai berikut.

a. Cita-cita Nasional. Dengan mencermati alinea kedua Pembukaan UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa kondisi masa depan bangsa Indonesia yang dicita-citakan adalah menjadi bangsa yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Cita-cita tersebut harus diyakini dan dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh elemen bangsa Indonesia.

b. Tujuan Nasional. Dengan mencermati alinea ketiga Pembukaan

UUD NRI 1945, bahwa kemerdekaan dari kolonialisme/penjajahan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan berkah dan rahmat Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) dan keinginan luhur bangsa Indonesia, yang selanjutnya menurut alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 harus terwadahi dalam bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila merupakan tujuan hidup dalam berkebangsaan Indonesia guna mencapai cita-cita berupa berkah dan rahmat kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan dan kemakmuran dari Allah SWT. Secara sederhana, bahwa tujuan hidup berkebangsaan (tujuan nasional) Indonesia itu dapat analogikakan dengan agama (Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, dll) yang diyakini dan dianut oleh umat beragama guna menggapai cita-citanya berupa berkah dan rahmat surga, yang juga dapat dianalogikakan dengan berkah dan rahmat kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan dan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tujuan nasional tersebut harus diyakini dan dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh elemen bangsa Indonesia.

c. Kepentingan Nasional. Kepentingan nasional bersifat "mutlak", sesuatu yang bersifat absolut, tidak bisa ditawar, tidak terbatas yang artinya bahwa dalam melaksanakan tujuannya diprioritaskan pada suatu yang tidak dapat ditunda atau dialihkan kepada tujuan lain seperti kelangsungan hidup NKRI yang mencakup didalamnya integritas territorial (*Archipelagic State*), menjaga kedaulatan nasional dan memberikan keselamatan bangsa Indonesia yang tentu saja harus berdasarkan karakteristik geografi Indonesia.

Untuk mewujudkan kepentingan nasional, tentunya tidak terlepas dari



pengaruh perkembangan politik global maupun regional. Oleh karena itu dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah- masalah yang bersifat global maupun regional kedepan harus mengutamakan akan pemberdayaan kemampuan yang dimiliki oleh NKRI yang memiliki sumber daya alam dan manusia sesuai dengan letak geografisnya. Melihat dari perspektif betapa pentingnya bagi Indonesia untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya berupa, kedaulatan, integritas territorial dan kolaborasi dengan dunia internasional. Dalam perkembangan situasi sekarang ini, perlunya Reformasi dan demokrasi yang berkelanjutan (Suistanable) agar menuju pemerintahan yang lebih baik, karena perkembangan global maupun regional senantiasa berubah secara dinamis yang tidak dapat dihindari lagi, namun harus disikapi adanya mengantisipasi dengan konsep kepentingan nasional Indonesia. Artinya kepentingan nasional suatu bangsa dengan sendirinya perlu mempertimbangkan berbagai nilai yang berkembang dan menjadi ciri negara itu sendiri. Nilai-nilai kebangsaan, sejarah, dan letak geografis menjadi ciri khusus yang mempengaruhi penilaian atas konsepsi kepentingan nasional suatu Negara.

Dengan mencermati alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, bahwa ada 4 (empat) kepentingan fundamental bangsa Indonesia yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional, sebagai berikut:

1. Kepentingan Keamanan berupa terlindunginya segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Kepentingan Kesejahteraan berupa majunya kesejahteraan bangsa Indonesia.
3. Kepentingan Kecerdasan berupa cerdasnya kehidupan bangsa Indonesia.

4. Kepentingan Ketertiban Dunia berupa terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Keempat kepentingan fundamental tersebut harus diyakini dan dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh elemen bangsa Indonesia.

d. Tugas Pokok Nasional. Dengan mencermati alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945, bahwa ada 4(empat) tugas pokok bangsa Indonesia yang harus dilaksanakan untuk memenuhi kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional, sebagai berikut :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencederdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Keempat tugas pokok tersebut juga harus diyakini dan dipedomani dalam kehidupan berbangsa dan bernegara oleh seluruh elemen bangsa Indonesia.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok nasional untuk memenuhi kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional sebagaimana telah dijelaskan di atas tersebut, maka diperlukan juga strategi pembangunan nasional yang mencermati, memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi ketahanan nasional. Geostrategi Indonesia akan memberikan arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna penyelenggaraan tugas pokok nasional dalam rangka memenuhi kepentingan nasional. Geostrategi Indonesia telah dirumuskan dalam konsepsi Ketahanan Nasional yang memiliki 8



(delapan) gatra Ketahanan Nasional, yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam (SKA), ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Kondisi Ketahanan Nasional sampai dengan akhir 2016 masih berada pada posisi kurang tangguh, dengan nilai indeks ketahanan sebesar 2,60.³ Secara garis besar kondisi geostrategi Indonesia pada masing-masing gatra Ketahanan Nasional dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Geografi. Kondisi geografi Indonesia mengandung faktor-faktor penentu strategis yang relatif permanen. Dengan garis pantainya yang panjang, laut teritorial beserta selat-selatunya dan wilayah udaranya menjadi jalur pelayaran dan penerbangan internasional. Wilayah perbatasan yang masih belum berkembang, menimbulkan permasalahan tersendiri. Semua itu memerlukan perhatian dari aspek pertahanan dan keamanan nasional. Sebagai suatu bangsa yang berada dalam lingkungan dunia yang luas, perjuangan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat mengakibatkan kepentingan bangsa Indonesia berhadapan dengan bangsa lain. Secara geografis, posisi wilayah Indonesia berada pada posisi silang, diantara benua Asia dan Australia serta diantara samudera Hindia dan samudera Pasifik, kemudian 2/3 luas wilayahnya berupa lautan, sehingga menjadi sangat strategis sebagai jalur lalu-lintas dan perdagangan internasional. Wilayah Indonesia yang sangat terbuka juga berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, India, Vietnam, Palau, Papua Nugini, Australia, Philipina, dan Timor Leste. Sebagian wilayah Indonesia juga dilalui cincin api (*ring of fire*).

b. Demografi. Indonesia pada tahun 2016 memiliki populasi penduduk sebesar 254.9 juta orang dengan menduduki posisi ke empat di dunia. Permasalahan yang

dihadapi penduduk Indonesia saat ini adalah masalah ketersediaan lapangan kerja. Terjadi ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan jenis dan jumlah lapangan kerja yang membutuhkan, serta masih kurangnya tenaga kerja yang dihasilkan melalui pendidikan dan latihan.

Indonesia menduduki posisi keempat sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat. PBB juga telah memproyeksikan dengan memperhatikan populasi absolut Indonesia di masa depan, di mana jumlah penduduk Indonesia akan lebih dari 250 juta jiwa pada tahun 2015, lebih dari 270 juta jiwa pada tahun 2025, lebih dari 285 juta jiwa pada tahun 2035 dan 290 juta jiwa pada tahun 2045. Proyeksi PBB ini menunjukkan bahwa ke depan Indonesia berpotensi mengalami bonus demografi.⁴

c. SKA. Indonesia memiliki kekayaan SKA yang sangat melimpah dan tersebar di berbagai wilayah. SKA terbagi menjadi SKA yang dapat diperbaharui (*renewable*) dan tidak dapat diperbaharui (*non renewable*). Beberapa potensi SKA yang cukup strategis itu ialah sektor migas, sektor kehutanan, sektor pertanian, sektor tambang, mineral dan sektor perikanan. Sumber-sumber kekayaan alam ini sebagai karunia Tuhan yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki beragam sumber kekayaan alam yang dapat dikelola untuk menyejahterakan seluruh bangsa Indonesia. Sumber kekayaan alam tersebut mulai dari yang berada di permukaan bumi, di perut bumi, di laut dan dibawah laut, di udara, bahkan di angkasa, namun dari sebagian besar sumber kekayaan alam yang dimiliki tersebut, pengelolaannya belum sepenuhnya mampu dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri.

d. Ideologi. Perkembangan dalam bidang ideologi yang cukup memprihatinkan adalah penurunan pemahaman dan



kesadaran sebagai masyarakat Indonesia terhadap nilai-nilai Pancasila. Meskipun Pancasila sebagai satu-satunya asas dan pedoman dalam kehidupan politik oleh organisasi sosial politik, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan berbagai lembaga kemasyarakatan lainnya, namun di sisi lain masih menguatnya ego kedaerahan dan primordialisme sempit (*ethno nasionalism*) memperlihatkan adanya penurunan pemahaman terhadap ideologi negara Pancasila. Selain itu terdapat kecenderungan aktivitas kelompok atau golongan radikal masyarakat tertentu yang memperlihatkan adanya gerakan pengerosan nilai-nilai Pancasila, baik secara terbuka maupun tertutup, yang secara perlahan memperlemah SDM yang berkualitas dan kepercayaan terhadap kemampuan bangsa Indonesia menurun. Bangsa Indonesia berideologi Pancasila, namun dalam pemahaman, penghayatan dan pengamalannya sehari-hari belum dilaksanakan secara konsekuen. Upaya sebagian kelompok masyarakat yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain masih ada, seperti dari kelompok yang terpengaruh dengan ideologi komunis dan kelompok yang terpengaruh dengan ideologi radikal. Selain itu paham liberalisme dan kapitalisme juga begitu kuat pengaruhnya menekan ideologi Pancasila.

e. Politik. Sejak Indonesia memasuki era reformasi, berbagai perkembangan di bidang politik telah mewarnai dinamika perpolitikan nasional, maupun lokal. Dari segi pemerintahan, telah mengalami pergantian pemimpin nasional setelah dilaksanakan Pemilu tahun 2014 yang lalu, maka dapat dikatakan bahwa proses pergantian pemerintahan di Indonesia telah berjalan sesuai dengan amanat UUD NRI tahun 1945 dan berlangsung dengan demokratis. Walaupun pada awal terpilihnya pemerintahan Presiden terpilih mengalami sedikit dinamika antara Koalisi

Indoneisa Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dimenangkan oleh KIH yang memperoleh 53.15% dan KMP 46.85%⁴⁸. Seiring berlangsungnya pemerintahan Presiden terpilih, kehidupan politik nasional secara umum cukup mantap dan terkendali, mampu mendukung kelancaran pembangunan nasional, melalui peningkatan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hubungan kelembagaan antar pemerintah (eksekutif) dengan DPR RI (legislatif) juga berlangsung harmonis walaupun pada awalnya menemui kendala. Sejalan dengan kematangan berdemokrasi diharapkan akan semakin membaik, kondusif dan menguatnya pencapaian good governance dalam sistem pemerintahan, mengingat program pembangunan nasional bergantung kepada keserasian hubungan kedua otoritas politik tersebut. Sistem pemerintahan NKRI menggunakan sistem presidensial yang membawahi 34 pemerintahan daerah provinsi dan 514 pemerintahan daerah kabupaten dan kota. Di seluruh daerah sejak paska peristiwa aksi tuntutan reformasi 1998 telah diterapkan otonomi daerah. Pemilihan presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/walikota, anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui proses pemilihan umum secara langsung.

f. Ekonomi. Di tengah ancaman krisis ekonomi global, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan mengalami tekanan kinerja perekonomian pada Semester I tahun 2016 ternyata hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berkisar 5,21 %, atau di bawah ekspektasi 5,7 %. Sebagai pembandingan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 adalah 5,11 %⁴⁹. Melemahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menyebabkan



berkurangnya daya serap tenaga kerja sebagai instrumen untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan.

Perekonomian Indonesia benar-benar tengah menanti sentimen positif dari agenda politik. Diharapkan pemerintah saat ini tidak akan menyalakan momentum ini dengan mengupayakan Indonesia bisa melaju kembali di atas 6 % pada tahun 2017. Kondisi pertumbuhan ekonomi nasional di akhir 2016 mencapai 5,2 %, diharapkan selama 2017 dapat ditingkatkan antara 5,2 - 5,4 %, sehingga di tahun 2018 bisa mencapai 6 %.⁵ Di sisi lain, kondisi fiskal masih dihadapkan pada persoalan belum optimalnya penerimaan negara dan belanja yang masih harus dipertajam, serta defisit anggaran harus dijaga dan keseimbangan primer juga masih harus diperbaiki. Sementara dari sisi eksternal, ekonomi Indonesia setidaknya akan dihadapkan dengan perlambatan ekonomi global, masih berlanjutnya ketidakpastian di Eropa pasca Brexit, perubahan politik di Amerika Serikat setelah terpilihnya Donald Trump yang diyakini akan berdampak luas, serta harga komoditas yang masih belum pulih sepenuhnya.

g. Sosial Budaya. Era Globalisasi telah membawa perubahan terhadap kondisi sosial budaya di Indonesia. Nilai-nilai budaya asli dari Indonesia mulai bergeser seiring dengan masuknya budaya-budaya asing ke Indonesia akibat globalisasi melalui kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam kondisi seperti itu, keberadaan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 sebagai nilai universal yang berasal dari nilai-nilai budaya asli Indonesia menjadi penting untuk diimplementasikan. Bagi bangsa Indonesia budaya adalah jembatan menuju kesuksesan, tempat untuk mencari solusi jika menghadapi permasalahan serta merupakan harta yang tak ternilai harganya. Pada prinsipnya setiap perkembangan dan

kemajuan dalam segi apapun, karena setiap manusia menginginkan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya menunjukkan bahwa keanekaragaman budaya tersebut merupakan hikmah. Pada masa lalu telah mampu memunculkan faktor-faktor perekat persatuan dan integrasi bangsa. Kecenderungan kebudayaan lokal yang semakin luntur namun keinginan untuk menjadi satu bangsa Indonesia semakin meningkat.

Kondisi sosial budaya menggambarkan dengan keragaman suku, ras, agama, adat dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tingkat kemiskinan masih tinggi, di tahun 2016, jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 28 juta orang atau 10,86 % dari jumlah penduduk. Penduduk Indonesia yang hidup di atas garis kemiskinan masih rentan terhadap guncangan ekonomi. Kesenjangan ditandai dengan tingkat rasio gini yang masih cukup tinggi yaitu di angka 0,39. Tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi yaitu sebesar 5,5 %.⁶

h. Pertahanan dan Keamanan. Kondisi geografi Indonesia yang sangat luas, memerlukan kekuatan militer yang handal dan terlatih maka disusunlah kebutuhan Alutsista tersebut melalui perencanaan strategis *Minimum Essential Force* (MEF) sampai dengan tahun 2024. Saat ini telah memasuki tahap kedua tahun 2015-2019. Realisasi MEF tahap kedua ini sudah sangat tertinggal lantaran belum memiliki payung hukum berupa Peraturan Presiden. Indonesia masih memiliki waktu 8 tahun ke depan, untuk itulah pemerintah sekarang perlu menaikkan anggaran pertahanan senilai Rp. 108.7 triliun atau setara 1,7% dari APBN. Kondisi pertahanan dan keamanan Indonesia belum terstruktur dalam sistem keamanan nasional yang komprehensif, sebagaimana yang sudah dimiliki oleh negara-negara maju.



Sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang Keamanan Nasional, sehingga dalam pengelolaan keamanan nasional masih terjadi dikotomi paradigma pertahanan ranahnya TNI dan keamanan ranahnya POLRI yang sering menjadi problem dalam menangani persoalan keamanan yang memerlukan keterlibatan aktor-aktor keamanan secara terpadu.

Perkembangan Politik Global dan Regional

Situasi politik global dan regional masih akan diwarnai dengan perebutan kepentingan, uang, sumber daya, dan wilayah. Saat ini Partai Komunis Tiongkok/PKT sedang menapaki jalan memperkuat militernya untuk bersiap perang dan perlombaan persenjataan militer menyaingi AS. RRT sekarang dijuluki sebagai badan ekonomi kedua terbesar di dunia, dan pasukan militernya juga diakui sebagai kekuatan ketiga terbesar dunia. Saat ini PKT sedang berambisi menyebarkan ideologi mereka, ideologi komunis.⁷

Amerika juga sedang menyesuaikan kembali strategi perangnya di Asia. Di wilayah Asia Tenggara, militer AS dalam rangka melakukan rebalancing power telah membuka pos baru di Darwin, Australia, serta melakukan penandatanganan *Defence Cooperation Agreement* (DCA) dengan Singapura dan sedang membujuk Filipina untuk membolehkan kembali militer AS “nongkrong” di Subic Bay. Bagi Singapura, penandatanganan DCA antara Singapura dan AS selain memperkuat hubungan bilateral kedua negara, juga sebagai sarana menjaga keseimbangan hubungan dengan Tiongkok. Apalagi Singapura berupaya netral dan menjadi broker yang bijaksana dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok dengan beberapa negara ASEAN seperti Brunei, Malaysia, Vietnam dan Filipina. Terpilihnya Donald Trump menjadi

Presiden AS akan dapat mempengaruhi hubungan AS dengan dunia Islam menjadi semakin memanas, setelah pernyataannya yang kontroversial terkait pelarangan umat Islam berkunjung ke AS. Begitu juga dengan ISIS masih tetap menjadi prioritas perhatian utama, karena ancaman terorisme tetap akan mewarnai politik internasional.⁸

Untuk mengatasi masalah dunia, terdapat peluang dan mekanisme. Mekanisme di sini di antaranya adalah PBB dan G20. Namun hingga saat ini, tugas kedua organisasi tersebut tidak bisa dibilang sukses. Mereka dinilai lamban dan berada jauh di belakang. Masalah-masalah global kemanusiaan di antaranya adalah: (1) senjata pemusnah massal, militerisasi politik dunia; (2) kemiskinan dan sejumlah besar umat manusia yang lemah; (3) tantangan lingkungan, perubahan iklim; dan (4) terorisme. Selain itu, masalah migrasi massal, xenofobia, dan intoleransi beragama, menjadi masalah di tengah kehidupan peradaban yang berbeda satu sama lain, tapi berjalan berdampingan.⁹

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-27 ASEAN yang berlangsung di Kuala Lumpur pada tanggal 18 - 22 November 2015 telah berhasil mengesahkan “*Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together*”, yang secara resmi mencanangkan pembentukan Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*). Selama hampir lima dasa warsa terakhir ASEAN telah membuktikan diri mampu menjaga stabilitas keamanan kawasan serta mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, tantangan ke depan yang dihadapi akan semakin kompleks dan dinamis, sehingga ASEAN perlu terus mengedepankan upaya bersama, terutama persatuan, kohesivitas dan sentralitas ASEAN. Sebagai organisasi yang berinteraksi dengan semua kekuatan besar dunia, serta sebagai kawasan yang memiliki kekuatan-kekuatan besar dunia,



ASEAN akan rentan terpengaruh oleh kekuatan besar untuk masuk ke dalam pusaran persaingan. Keaktifan ASEAN dalam berinteraksi secara netral melalui berbagai mekanisme yang telah dibentuk untuk menjaga keseimbangan dinamis di kawasan menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, menjaga relevansi ASEAN bagi rakyat, kawasan dan global juga harus terus menjadi nafas utama kerja sama ASEAN yang secara konsisten berpusat dan berorientasi pada kepentingan rakyat (*peoples-centered and peoples-oriented*).¹⁰

Geostrategi Indonesia dalam Menghadapi Dinamika Politik Global dan Regional

Geostrategi Indonesia ditengah-tengah dinamika perkembangan politik global dan regional perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan-kemungkinan negatif yang dapat merugikan dan membahayakan kepentingan nasional. Setelah memahami tentang kondisi ketahanan nasional dan dinamika perkembangan politik global dan regional, perlu dicermati, diperhatikan dan dipertimbangkan pada tiap gatra Ketahanan Nasional, sebagai berikut.

a. Geografi. Kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai jalur lalu-lintas dan perdagangan internasional, karakteristik wilayahnya yang sangat luas dan terbuka, berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara tetangga, serta dilalui cincin api (*ring of fire*) memiliki beberapa kerawanan yang perlu diwaspadai, sebagai berikut :

1. Kemungkinan terjadinya didominasi kepentingan negara besar yang sedang berebut pengaruh di kawasan Asia di jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia).
2. Kemungkinan terjadinya *spill-over* (luapan) dampak konflik kekerasan di Laut China Selatan, apabila eskalasi

konflik di Laut China Selatan terus meningkat.

3. Kemungkinan terjadinya dorongan pengaruh kepentingan negara besar yang dapat memicu eskalasi sengketa batas wilayah negara dengan negara-negara tetangga sesama anggota ASEAN, apabila proses implementasi *ASEAN Community* ternyata tidak dapat berjalan sesuai kesepakatan.
4. Kemungkinan terjadinya infiltrasi kepentingan negara besar dengan memanfaatkan isu kejahatan lintas negara (*transnational crime*), karena masih kurangnya kemampuan pengawasan terhadap wilayah perairan dan udara nasional yang sangat luas dan terbuka.
5. Kemungkinan terjadinya infiltrasi kepentingan negara besar ketika terjadi bencana alam yang sangat besar.

b. Demografi. Kondisi penduduk Indonesia yang jumlahnya sudah mencapai 254 juta jiwa akan memungkinkan Indonesia menjadi arena persaingan penguasaan pasar barang-barang yang telah diproduksi oleh negara besar, apabila pemerintah tidak mampu memberdayakannya.

c. SKA. Kondisi beragam sumber kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia akan memungkinkan Indonesia menjadi arena persaingan dalam penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam negara besar, apabila bangsa Indonesia tidak mampu mengamankan dan mengelolanya sendiri.

d. Ideologi. Belum konsekuennya implementasi pemahaman, penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila akan memungkinkan lebih mudah bagi negara besar untuk memasukan ideologinya di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.



e. Politik. Dengan banyaknya daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penerapan sistem otonomi daerah dan sistem demokrasi pemilihan umum secara langsung akan memungkinkan dimanfaatkan oleh negara besar melakukan infiltrasi kepentingannya.

f. Ekonomi. Kondisi ekonomi nasional yang belum begitu kokoh akan memungkinkan mudah dimanfaatkan negara besar untuk melakukan infiltrasi kepentingannya melalui paket-paket bantuan ekonominya.

g. Sosial Budaya. Kondisi sosial budaya nasional dengan keragaman suku, ras, agama, adat dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia akan memungkinkan negara besar mudah melakukan upaya memecah belah persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat guna menjatuhkan pemerintah yang kebijakannya tidak sejalan dengan kepentingannya.

H. Pertahanan dan Keamanan. Kondisi pertahanan dan keamanan Indonesia yang belum terstruktur dalam sistem keamanan nasional secara komprehensif, sebagaimana yang sudah dimiliki oleh negara-negara maju akan memungkinkan negara besar mudah menjatuhkan usaha-usaha pemerintah dalam mengatasi persoalan keamanannya dengan memperkerakannya sebagai kegiatan ilegal yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

PENUTUP

Demikian kajian singkat tentang “Geostrategi Indonesia Dalam Dinamika Politik Global dan Regional” yang dapat disusun, semoga bisa bermanfaat menjadi bahan masukan dan pemikiran positif bagi upaya perjuangan penyelenggaraan tugas pokok nasional untuk memenuhi dan melindungi kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional Indonesia.

Setelah mencermati, memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa kerawanan pada masing-masing gatra Ketahanan Nasional di tengah dinamika perkembangan politik global dan regional, maka diperlukan upaya-upaya untuk antisipasinya sebagai berikut:

Pemerintah perlu segera menindaklanjuti proses reformasi sektor keamanan (security sector reform) sampai terbangunnya sistem keamanan nasional yang komprehensif, untuk melindungi kepentingan nasional pada seluruh gatra Ketahanan Nasional.

a. Pemerintah perlu memperkuat kemampuan dalam pemberdayaan penduduk untuk bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas bagi segenap usaha pengelolaan sumber kekayaan alam yang mandiri.

b. Pemerintah perlu melakukan usaha pemerataan penyebaran penduduk, selain untuk menjaga dan mengawasi potensi sumber kekayaan alam yang dimiliki, juga untuk meningkatkan tingkat kesejahteraannya, yang diiringi dengan pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan umum, serta infrastruktur ekonomi yang diperlukan pada titik-titik wilayah yang akan menjadi obyek pemerataan penyebaran penduduk.

c. Pemerintah perlu melakukan usaha penguatan program pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap ideologi Pancasila secara berkesinambungan kepada masyarakat, baik melalui pemanfaatan media informasi, pengarahan langsung kepada masyarakat, maupun melalui program pendidikan mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas, sampai dengan perguruan tinggi.

d. Pemerintah perlu melakukan usaha penguatan kemampuan ekonomi yang berbasis kemandirian melalui efisiensi



penggunaan anggaran dan pemberdayaan sumber-sumber pemasukan APBN, untuk menghindari infiltrasi kepentingan negara besar melalui paket-paket bantuan ekonomi.

e. Pemerintah perlu melakukan usaha perluasan lapangan kerja, serta melakukan pembimbingan dan pendampingan secara langsung kepada penduduk dalam katagori miskin dengan program-program usaha ekonomi kerakyatan, agar dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, serta gini rasio secara signifikan.

f. Pemerintah perlu melakukan usaha penguatan program “Kebhinekatunggalikaan” untuk memperkokoh soliditas persatuan dan kesatuan bangsa dengan memberdayakan elit politik, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di daerah-daerah seluruh wilayah NKRI.

g. Pemerintah perlu melakukan usaha penguatan dan penyempurnaan terhadap sistem otonomi daerah dan demokrasi pemilihan presiden/wakil presiden, kepala/wakil kepala daerah dan wakil-wakil rakyat secara langsung yang lebih efektif dan efisien dalam kerangka NKRI Berdasarkan Pancasila, agar stabilitas politik nasional senantiasa terjaga dan kondusif, sehingga tidak ada celah bagi negara besar untuk melakukan infiltrasi kepentingannya.

Pemerintah perlu segera menginisiasi penyusunan Regulasi atau Undang-Undang tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang didalamnya mengatur penegasan cita-cita nasional, tujuan nasional, kepentingan nasional dan tugas pokok nasional sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

Daftar Pustaka

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Lemhannas RI 2012, *Geostrategi dan Ketahanan Nasional Republik Indonesia*.
- Sunardi RM 1999, *Geostrategi Indonesia*.
- Erlangga Pratama, 21 Desember 2015, “Wajah Politik Internasional Tahun 2016”, *Neraca*, <http://www.neraca.co.id/article/63012/wajah-politik-internasional-tahun-2016>
- Farid Hidayat, 8 Februari 2017, “Menko Darmin: Pertumbuhan 6 % di 2018 itu masuk akal”, <https://www.merdeka.com/uang/menko-darmin-pertumbuhan-6%-di-2018-itu-masuk-akal.html>
- Ina Hagniningtyas Krisnamurthi, Maret 2016, “Menuju Masyarakat ASEAN yang Dinamis”, <http://www.kemlu.go.id/Majalah/MAJALAH%20MASYARAKAT%20ASEAN%20edisi%2011.pdf>
- Indonesia Investments, *Penduduk Indonesia*, <http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/demografi/item67>
- RBTH Indonesia, 27 April 2016, “Kegelisahan Dunia Global”, http://indonesia.rbth.com/politics/2016/04/27/kegelisahan-dunia-global_588651
- Septian Deny, 29 Desember 2016, “9 Tantangan Ekonomi Indonesia di 2017”, *Liputan 6*, <http://bisnis.liputan6.com/read/2691037/9-tantangan-ekonomi-indonesia-di-2017>
- Yeremia Sukoyo, 23 November 2016, “Lemhannas : Ketahanan Nasional Kurang Tangguh”, *Berita Satu*, <http://www.beritasatu.com/nasional/400844-lemhannas-ketahanan-nasional-kurang-tangguh.html>
- Zang Shan, 9 Agustus 2016, “Analisis Terkini



Situasi Politik Dunia, 2016-2017 yang Penuh Gejolak Besar,” Epoch Times, <http://erabaru.net/2016/08/09/analisis-terkini-situasi-politik-dunia-2016-2017-yang-penuh-gejolak-besar/>

Dalam penyelenggaraan tugas pokok nasional untuk memenuhi kepentingan nasional guna mewujudkan tujuan nasional dalam rangka mencapai cita-cita nasional sebagaimana telah dijelaskan di atas tersebut, maka diperlukan juga strategi pembangunan nasional yang mencermati, memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia akan memberikan arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna penyelenggaraan tugas pokok nasional dalam rangka memenuhi kepentingan nasional.

Perkembangan politik global dan regional masih akan diwarnai dengan perebutan kepentingan, uang, sumber daya, dan wilayah. Saat ini Partai Komunis Tiongkok/PKT sedang menapaki jalan memperkuat militernya untuk bersiap perang dan perlombaan $\%$ jataan militer menyaingi AS. RRT sekarang dijuluki sebagai badan ekonomi kedua terbesar di dunia, dan pasukan militernya juga diakui sebagai kekuatan ketiga terbesar dunia. Saat ini PKT sedang berambisi menyebarkan ideologi mereka, ideologi komunis.¹¹

Kondisi geostrategi Indonesia ditengah-tengah dinamika perkembangan politik global dan regional harus diwaspadai, sebagai usaha mengantisipasi berbagai kemungkinan-kemungkinan negatif yang dapat merugikan dan membahayakan kepentingan nasional. Setelah memahami tentang kondisi geostrategi Indonesia dan dinamika perkembangan politik global dan regional.

¹ Modul Geostrategi

² Modul Geostrategi

³ Yeremia Sukoyo, 23 November 2016, “Lemhannas : Ketahanan Nasional Kurang Tangguh,” Berita Satu, <http://www.beritasatu.com/nasional/400844-lemhannas-ketahanan-nasional-kurang-tangguh.html>

⁴ Indonesia Investments, Penduduk Indonesia, <http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/demografi/item67>

⁵ Farid Hidayat, 8 Februari 2017, “Menko Darmin: Pertumbuhan 6 % di 2018 itu masuk akal,” <https://www.merdeka.com/uang/menko-darmin-pertumbuhan-6-%-di-2018-itu-masuk-akal.html>

⁶ Septian Deny, 29 Desember 2016, “9 Tantangan Ekonomi Indonesia di 2017,” Liputan 6, <http://bisnis.liputan6.com/read/2691037/9-tantangan-ekonomi-indonesia-di-2017>

⁷ Zang Shan, 9 Agustsus 2016, “Analisis Terkini Situasi Politik Dunia, 2016-2017 yang Penuh Gejolak Besar,” Epoch Times, <http://erabaru.net/2016/08/09/analisis-terkini-situasi-politik-dunia-2016-2017-yang-penuh-gejolak-besar/>

⁸ Erlangga Pratama, 21 Desember 2015, “Wajah Politik Internasional Tahun 2016,” Neraca, <http://www.neraca.co.id/article/63012/wajah-politik-internasional-tahun-2016>

⁹ RBTH Indonesia, 27 April 2016, “Kegelisahan Dunia Global,” http://indonesia.rbth.com/politics/2016/04/27/kegelisahan-dunia-global_588651

¹⁰ Ina Hagniningtyas Krisnamurthi, Maret 2016, “Menuju Masyarakat ASEAN yang Dinamis,” <http://www.kemlu.go.id/Majalah/MAJALAH%20MASYARAKAT%20ASEAN%20edisi%202011.pdf>

¹¹ Zang Shan, 9 Agustsus 2016, “Analisis Terkini Situasi Politik Dunia, 2016-2017 yang Penuh Gejolak Besar,” Epoch Times, <http://erabaru.net/2016/08/09/analisis-terkini-situasi-politik-dunia-2016-2017-yang-penuh-gejolak-besar/>